

RUU Perampasan Aset Selalu Gagal Masuk Prolegnas Prioritas

JAKARTA (IM) - Direktur Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Fithriadi Muslim mengatakan, pihaknya sudah memperjuangkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, kata dia, RUU Perampasan Aset tak pernah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas di DPR RI, termasuk di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Hanya masuk long list, ini saja enggak cukup, yang penting itu masuk (Prolegnas) prioritas sehingga dibahas pada tahun itu, nah itu kita selalu mengalami kegagalan," kata Fithriadi dalam diskusi secara daring, Kamis (25/11).

Fithriadi mengatakan, RUU Perampasan Aset perlu segera disahkan mengingat

modus pencucian uang saat ini semakin canggih. Ia mencontohkan, salah satu kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (IPPU) yang menjerat Murtala Ilyas. Dalam putusan pengadilan, Mahkamah Agung (MA) memvonis Murtala 8 tahun penjara, namun aset yang dimilikinya dikembalikan.

"Artinya kalau asetnya tidak diburu juga, tidak dirampas, ini tidak menimbulkan efek jera, apalagi perkembangannya yang terjadi upaya pencucian uang di kita memakai berbagai macam pihak dengan skema bermacam-macam sehingga terkesan tidak ada hubungan aset dengan kejahatan yang dilakukan," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Fithriadi menekankan, pentingnya regulasi terkait perampasan aset tersebut, di mana dalam mengungkapkan riwayat aset juga membutuhkan waktu yang lama. ● han

KASAD ke Prajurit: Jangan Berpikir Membunuh KKB, tapi Selamatkan Rakyat

MANOKWARI (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengingatkan prajurit yang melaksanakan tugas di wilayah konflik seperti di wilayah Papua, untuk tidak berfikir ingin membunuh KKB. Tetapi mereka harus berpikir melaksanakan tugas negara untuk mengamankan masyarakat Papua yang saat ini diintimidasi oleh kelompok-kelompok radikal bersenjata.

Pernyataan ini disampaikan mantan Pangkostrad itu di depan para Perwira dan Komandan Satuan (Dansat) jajaran Kodam Kasuari di Aula Makodam Kasuari, Arfai, Papua Barat, Kamis (25/11). Pengarahan tersebut dilakukan di sela agenda lawatannya mengunjungi wilayah Papua Barat, termasuk ke Kodam Kasuari untuk bertatap muka langsung dengan para prajurit yang bertugas di wilayah Timur Indonesia.

Ia mengaku sengaja datang ke Papua Barat karena setiap dia menjabat di satuan baru, pasti akan mengunjungi anak buah secara langsung terutama satuan-satuan yang sangat membutuhkan perhatian. "Ini adalah salah satu angan-angan saya apabila saya menjabat, saya akan melihat daerah operasi dan juga ingin tahu bagaimana kesulitan prajurit, bagaimana hambatan prajurit, bagaimana tantangan di lapangan," ujarnya.

Dudung meminta prajurit yang bertugas di Papua untuk selalu hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat Papua dan jangan sekali-sekali segan untuk turun membantu mengatasi masalah yang timbul.

"Cintai masyarakat Papua seperti layaknya kita mencintai diri sendiri dengan segala macam keterbatasan, TNI harus hadir seperti yang tertuang dalam salah satu perintah

harian KSAD, apapun yang menjadi kebutuhan rakyat kita harus tahu," kata Dudung berpesan.

"Sebagai pemimpin harus tahu situasi yang berkembang khususnya di wilayah Papua, saya sering katakan dan sampaikan kepada prajurit, kalian harus dicintai oleh rakyat Papua, harus hadir mengamankan masyarakat, sekecil apapun," katanya menegaskan.

Selain itu, kata Dudung, sebagai pemimpin harus berani dan jangan takut untuk menghadapi risiko dengan mengedepankan hati nurani. "Harus peka terhadap situasi yang apabila mengganggu persatuan dan kesatuan kalian harus hadir di situ," ucapnya.

Dudung menegaskan, meskipun di setiap bertugas untuk terus mengamalkan delapan wajib TNI untuk hadir dan mengatasi kesulitan rakyat, kewaspadaan harus tetap ada dan memperhatikan faktor keamanan.

"Apabila suatu insiden terjadi, mereka (KKB) melakukan suatu tindakan kalian harus siap, tetapi pada dasarnya bahwa kalian tugas di Papua adalah bagaimana mengamankan dan menyelamatkan warga Papua," ujarnya.

Di depan para Dansat, Dudung berpesan agar sebagai unsur pimpinan harus dekat dengan anak buah dalam pemimpin harus mempunyai imajinasi, inovasi, visi, misi, harapan dan cita-cita untuk kesejahteraan prajuritnya sehingga kehadiran pemimpin betul-betul dirasakan oleh anak buah. Kunjungan Jenderal Dudung ke Papua Barat ini merupakan kunjungan perdana sebagai KSAD sejak dilantik oleh Presiden pada 17 November lalu di Istana Merdeka. Kunjungan ini juga merupakan rangkaian kunjungan ke wilayah Timur Indonesia. ● mei

PP Demo Minta Junimart Girsang Minta Maaf, Ini Tanggapan Bamsuet

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Bambang Soesatyo merespons aksi demonstrasi anggota PP yang meminta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta maaf atas atas pernyataannya yang dilontarkan beberapa waktu lalu. Aksi demo itu digelar di depan Gedung DPR, Kamis (25/11) siang.

Dalam pernyataannya, Junimart meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menertibkan organisasi massa (ormas) yang kerap terlibat bentrok.

"Saya hanya menyampaikan kepada teman-teman dalam mengeluarkan statement harus terukur dan tidak boleh menyinggung suatu organisasi kelompok atau siapapun lah," ujar Bamsuet -panggilan untuk Bambang Soesatyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/11).

"Sehingga kita harapkan ada rasa saling menghormati dari kita semua. Menurut saya semua peristiwa akan memberikan pembelajaran bagi semuanya," ucapnya.

Sebagai salah seorang pengurus dari ormas tersebut, Bamsuet pun berpesan agar permasalahan itu dapat diselesaikan secara baik. Ia berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi pada masa yang akan datang. "Saya berharap kawan-kawan, adik-adik saya di Pemuda Pancasila

bisa menyelesaikan dengan baik terus dengan komitmen perdamaian yang tidak boleh lagi diulangi," tutur Bamsuet.

"Sekaligus memberikan pesan pada publik dan masyarakat lain bahwa kita hidup saling menghargai," katanya.

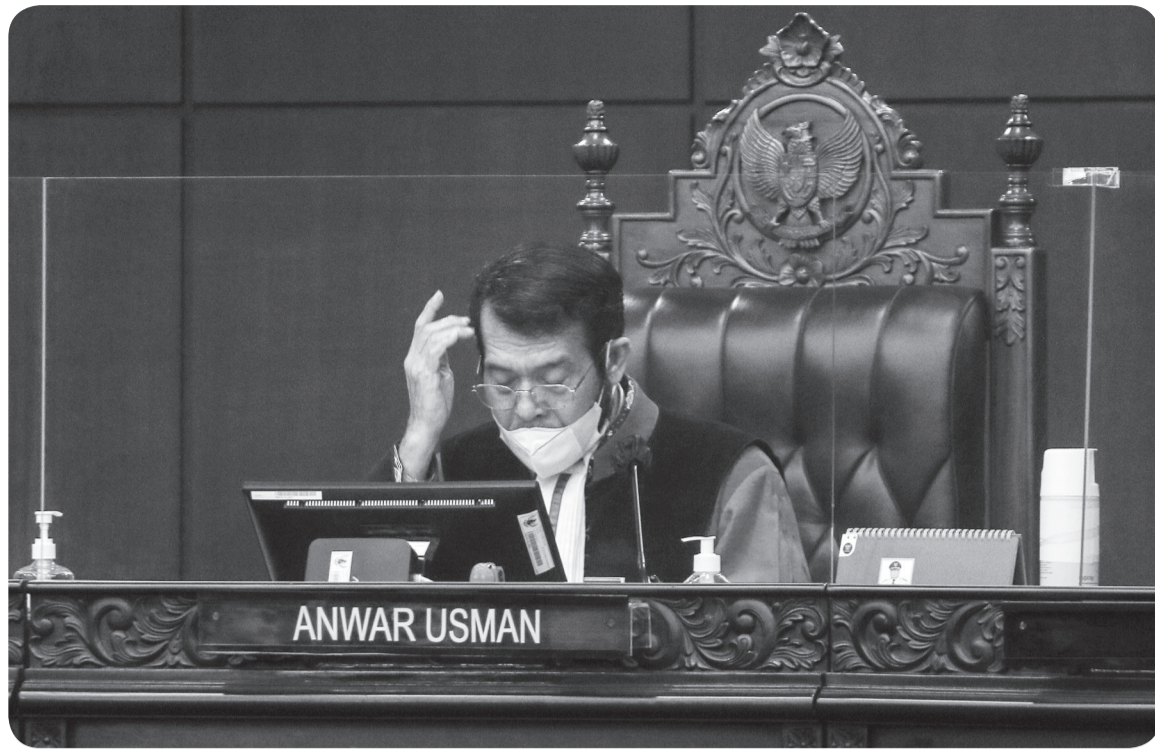
Sebelumnya, Junimart meminta Kemendagri tidak memperpanjang bahkan mencabut izin organisasi masyarakat yang telah menciptakan keresahan. Pernyataan tersebut ia sampaikan menanggapi pemberitaan di sejumlah media massa terkait bentrok antar Ormas Forum Betawi Rempug (FBR) dengan Pemuda Pancasila di Cileug, Kabupaten Tangerang. Bentrok ini diduga terjadi akibat perebutan penguasaan lahan.

Sebagai solusi lebih lanjut, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini mendesak Kemendagri segera menertibkan ormas yang kerap terlibat bentrok, serta meresahkan masyarakat.

Sebab, kata Junimart, pendirian ormas bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban umum. Namun, imbas dari pernyataan tersebut, sejumlah anggota ormas Pemuda Pancasila melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR untuk mendesak Junimart meminta maaf atas pernyataannya. Junimart pun diketahui telah meminta maaf dan memberikan klarifikasi atas pernyataannya. ● han

2 Polhukam

FOTO/ANT



MK TOLAK GUGATAN UU CIPTA KERJA

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Mahfud dan Panglima TNI Bahas Papua dan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa pendekatan baru dalam menangani konflik di Papua tetap sesuai dasar hukum yang ditetapkan pemerintah.

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam Mahfud MD bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (25/11). Dalam pertemuan itu, keduanya berdiskusi tentang Papua hingga kasus pelanggaran HAM berat.

Mahfud menjelaskan, ada

dua hal penting dalam pembahasan. Pembahasan pertama ihwal pendekatan baru yang akan dilakukan di Papua.

"Banyak hal tadi didiskusikan, tapi kita akan menyampaikan yang selama ini menjadi concern kita, Kemenko Polhukam dan Mabes TNI, Menko Polhukam dan Panglima TNI

adalah dua hal saja. Pertama pendekatan baru tentang penanganan Papua," tutur Mahfud melalui keterangan video.

Dijelaskannya bahwa secara prinsip pendekatannya sudah dituangkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan dilanjutkan dengan Keppres Nomor 20 Tahun 2020. Di dalam dua produk hukum itu, Papua akan dibangun menggunakan pendekatan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis.

"Artinya, di Papua itu pendekatannya bukan senjata, tapi kesejahteraan. Komprehensif meliputi semua hal, sinergis mencakup semua lem-

bagia terkait secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri," ujarnya.

Menurut Mahfud, di Bumi Cendrawasih itu nantinya akan dilakukan operasi teritorial, bukan operasi tempur. Mahfud mengklaim, Panglima TNI telah memiliki gagasan tersebut.

"Pendekatan teknisnya tentu adalah operasi teritorial, bukan operasi tempur. Saya tadi sudah banyak diskusi. Pak Panglima sudah punya gagasan-gagasan tentang pendekatan baru itu dan nanti akan disampaikan pada saatnya," ungkapnya.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa pendekatan baru dalam menangani konflik di Papua akan sesuai dasar hukum yang ditetapkan pemerintah.

"Jadi sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Menko Polhukam, saya menggunakan dasar hukum yang memang sudah dikeluarkan pemerintah," ujar Andika, dikutip dari siaran pers Humas Kemenko Polhukam, Kamis (25/11).

Seperti diketahui, konflik antara TNI-Polri dan KKB di Papua telah berlangsung bertahun-tahun. Mereka kerap kali terlibat dalam kontak senjata. Pertikaian bersenjata ini tidak

hanya menimbulkan korban dari kedua belah pihak yang bertikai, melainkan masyarakat sipil juga turut terkena dampak dari konflik ini.

Akan tetapi, Andika belum memaparkan secara detail terkait pendekatan baru. Ia berjanji akan memaparkan secara detail ketika berkunjung ke Papua pekan depan.

"Dan itu nanti secara detail akan saya jelaskan pada saat saya di Papua minggu depan," ungkap Andika.

Sedangkan soal penanganan HAM juga masuk dalam agenda pembahasan keduanya, terutama Pelanggaran HAM Berat. Indonesia sendiri, kata Mahfud, memiliki 13 kasus pelanggaran HAM berat. Satu pelanggaran HAM berat diantaranya terjadi saat zaman Presiden Jokowi, yakni Kasus Paniai Berdarah di 2014 silam.

Mahfud mengaku akan berkoordinasi dengan Andika apakah ada keterlibatan TNI di dalamnya. "Yang terjadi pada zaman Pak Jokowi itu ada 1 yaitu peristiwa Paniai, yang baru diumumkan bulan Juni yang lalu. Itu ada yang melibatkan TNI, melibatkan apa, nanti yang menyangkut TNI ini Panglima akan berkoordinasi dengan kita," kata Mahfud. ● han



AKSI HARI GURU NASIONAL

Pengunjukrasa yang tergabung dalam Aliansi Forum Guru Bandung Raya melakukan teatrikal saat berunjukrasa "Indonesia Darurat Guru PNS" di Monumen Perjuangan Rakyat, Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/11). Aksi dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tersebut meminta Pemerintah Indonesia segera mengangkat guru honorer di sekolah negeri ataupun swasta menjadi PNS dan memberi kesempatan untuk PPG serta memberikan gaji diatas upah minimum regional.

Hary Tanoesoedibjo Optimis Perindo Bakal Dulang Suara Besar Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Ketua Umum DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo optimis partainya akan mendulang suara signifikan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melalui penyelenggaraan Konvensi Rakyat berbasis digital. Sebab, bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang lolos Konvensi Rakyat akan turut berpartisipasi mengampayek Partai Perindo ke masyarakat.

Sejalan dengan itu, Hary Tanoesoedibjo mengatakan Partai Perindo terus melakukan pembenahan sumber daya manusia (SDM) demi menyongsong Pemilu 2024 serta memelopori demokrasi digital.

"Saya yakin semakin yakinnya dan ditambah Konvensi Rakyat ini, di mana nanti calon

anggota legislatif ikut berkampanye dan mereka memiliki kapasitas, saya yakin semakin yakinnya, pada Oemilu 2024 nanti Partai Perindo akan memperoleh suara yang besar," ujar Hary Tanoesoedibjo.

Hary Tanoesoedibjo mengatakan Konvensi Rakyat di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/11).

Hary Tanoesoedibjo mengatakan Konvensi Rakyat di Jakarta Concert Hall, Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/11).

"Dengan Perindo memulai

itu pasti akan memberikan nilai tambah," jelasnya.

Sebagai informasi, Konvensi Rakyat berbasis digital Partai Perindo ditujukan untuk menjaring bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di semua tingkatan pemilihan (DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).

Melalui Konvensi Rakyat Partai Perindo, masyarakat dapat memilih bacaleg yang berintegritas, serta memiliki relasi kokoh dengan partai untuk memperjuangkan kesejahteraan publik. Konvensi Rakyat Partai Perindo ini juga membentuk ekosistem digital yang mampu memperkuat partisipasi politik masyarakat dalam proses pencalonan anggota legislatif. ● mei

PENGUMUMAN
PT. INDO SPINE MEDIKA ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta. Selain mengumumkan bahwa akan dilikuidasi 95% saham milik Tuan MARCONI SALIM kepada Tuan THO ANTON HARTONO.
Pengalihan saham tersebut akan dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
Para kreditor perseroan yang ingin mengajukan keberatan atas rencana pengalihan saham dapat menyampaikan keberatannya secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pengumuman ini dan diamatkan kepada Direksi Perseroan.
PT. INDO SPINE MEDIKA, World Trade Center 5, Lt. 3A (Dalam Area PT Regus), Wisma Metropolitan, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Karet Selatibudi, Jakarta Selatan.
Up. Direktur
Jika dalam waktu tersebut tidak ada keberatan yang disampaikan kepada Perseroan, maka para kreditor Perseroan dianggap telah setuju atas rencana pengalihan saham tersebut.
Jakarta, 25 November 2021
PT. Indo Spine Medika
Dr Irma Yunita
Direktur

PENGUMUMAN
Telah dilakukan Pengalihan Piutang dan Atau Cessie PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada Tanggal 25 November 2021 dengan keterangan sebagai berikut :
1.) Nama Debitur PT. Unggul Ciwidye
2.) Nilai Pengalihan Piutang (Cessie) sebesar Rp. 202.016.500,00.
3.) Cessionaris a.n Sdr. H. Abdul Rahman beralamat di Jl. Cendrawasih Raya No.46 RT.04 RW.02, Kel. Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka tmt 25 November 2021 seluruh kewajiban hutang kredit atas nama PT. Unggul Ciwidye telah beralih kepada pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas.
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Regional Retail Collection & Recovery Jakarta 2

PENGUMUMAN PENAMBAHAN MODAL MELALUI KONVERSI UTANG PT REDACHEM INDONESIA ("PERSEROAN")
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikonversikan Sebagai Setoran Modal, dengan ini diberitahukan bahwa telah diputuskan pembayaran atas tagihan dari Reda Industrial Materials FZE kepada Perseroan akan dikonversikan menjadi setoran modal oleh Reda Industrial Materials FZE atas saham yang belum ditempatkan dalam Perseroan, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Redachem Indonesia Nomor 206 dan telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0066383.AH.01.02.TAHUN2021 tanggal 23 November 2021 dan telah diberitahukan berdasarkan Surat Penetapan Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0476438 dan No. AHU-AH.01.03-0476439 tanggal 23 November 2021.
Demikian pengumuman ini disampaikan
Jakarta, 26 November 2021
PT REDACHEM INDONESIA